

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.²

Pemilu merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur.³ Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

² Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Keadilan Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta: Raja Grafindo), hal.1.

³ LIPI, 1998. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2016, 4 (1) : 30.43.

pemerintahan yang mendapat tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.⁴ Keberhasilan Pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Pemilu memberikan legitimasi terhadap pemerintahan, parlemen, dan sistem politik itu sendiri. Bagian dari pemilu ada unsur komunikasi politik menjadi sangat fundamental. *Retorik* dan *Propaganda* suatu partai politik didalam kampanye dapat dikatakan sebagai komunikasi politik yang masih dapat diperdebatkan.⁵ Salah satu syarat individu atau partai politik untuk terlibat dalam pemilihan umum adalah partai politik yang lolos verifikasi faktual partai politik.

Lukman Edy berpendapat bahwa pemilu adalah instrumen demokrasi untuk mengukur proses demokrasi. Pemilu dapat menggambarkan bagaimana legitimasi suksesi pemimpin pemerintahan diperoleh melalui partisipasi politik warga negara memberikan suara dalam pemilu. Kualitas pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik.⁶ Angka partisipasi politik menunjukan

⁴ EJournal Ilmu Komunikasi. Vol 4. No. 1. Tahun 2016. hlm.30-43.

⁵ Chusnul Mar'iyah. *Partai Politik dan Demokrasi*. Jurnal ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR-RI. 2018. hlm.99..

⁶ Wilma Silalahi. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 45.

warga negara mengerti masalah-masalah politik yang ada dan ingin berpartisipasi dalam aktivitas pemilu. Angka partisipasi rendah menunjukkan tidak peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa atau kurangnya pemahaman warga terhadap politik yang sedang berlangsung.⁷

Ismail Sunny menyatakan bahwa pemilu adalah suatu kepastian dan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa jangka dalam jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diakui oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu⁸. Sedangkan dalam ilmu hukum tata negara, Pemilu merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanah rakyat. Dengan kata lain, pemilu merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokrasi.

Pemilu diatur lebih lanjut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut tentang Undang-Undang Pemilu adalah Perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu. Dalam perkembangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami berbagai perubahan sejak pemilu pertama diadakan Tahun 1955

⁷ Muhammad Lukman Edy. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intnt UU Pemilu 2017 tentang Pemilihan Umum)*. (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, Cetakan 1. Oktober 2017), hlm.1.

⁸ Ismail Sunny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Aksara Baru. 1984). hlm. 21.

sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.⁹

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan yang independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib KPU. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

⁹ Humas Setkab RI, “*Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)*” (setkab.go.id/inilah-undang-undang nomor 7 tahun 2017, Diakses pada 21 Oktober 2019, 2019).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. KPU merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen atau mandiri sebagaimana termasuk dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “ Dalam menyelenggarakan pemilu KPU harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip.” Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU pusat dan KPU Kabupaten/Kota. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 “Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.” Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu oleh Sekretariat Jendral (Sekjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU Pusat berkedudukan di Jakarta, KPU provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan yang mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa dan pendidikan politik.

Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa inggris. "*participation*" yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam Kamus Politik, partisipasi adalah ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak secara langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹⁰

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lainnya, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit

¹⁰ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).¹¹

Pada dasarnya partisipasi politik dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintahan melalui mekanisme politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum, dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Didalam Undang-Undang tersebut tertera jelas

¹¹ *Ibid.*, hlm. 368.

¹² Sudijono Sastroatmodjo. *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995). hlm.56.

pembangunan, pelayanan, penyadaran dan pemberdayaan pemuda untuk mencapai tujuan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Kepemudaan tersebut. Pelayanan kepemudaan sesuai Pasal 7 diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat profesionalisme dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang genap berumur 17 atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggaraan Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dengan status mereka adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019 tidak ada perubahan terhadap frasa yang sesuai dengan Undang-undang tersebut dan sudah jelas.

Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 Tahun. Pemilih pemula ini pemilih yang memang berstatus siswa, mahasiswa, dan yang sudah berkerja dengan usia tersebut bukan para pensiunan Tentara Negara Indonesia (TNI) yang sudah pensiun dan pertama kalinya menggunakan hak suaranya. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak

memiliki pengalaman voting pada pemilihan sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. Pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial. Pentingnya pemilih pemula diindungi karena nantinya ketika Indonesia di 2045 dengan usia 100 Tahun, para pemilih pemula inilah yang nantinya akan menduduki lembaga-lembaga tertinggi di negara ini.

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk di dalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan tentang politik termasuk dalam pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik atau golput pada pelaksanaan pemilu. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya pemilih pemula tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan.

Dalam konteks tersebut, pemilih pemula perlu mengerti dan paham apa makna demokrasi dalam sebuah Negara dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan yang berguna bagi Negara. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai warga Negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warga Negara. Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya

kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam upaya ini mereka memerlukan sosialisasi dan pendidikan politik untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik. Karena sosialisasi dan pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk di mobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 yang menyatakan: “Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten atau kota masyarakat”. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagai lembaga penyelenggara harus lebih intens melakukan literasi politik dengan cara melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula agar menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas adalah pemilih yang lebih mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihannya. Dalam pendidikan, pemilih tersebut juga harus diberikan pemahaman dan keterampilan teknis pencoblosan yang sah agar kehadiran pemilih muda ke TPS tidak sia-sia.¹³

Ditengah pandemi covid-19 seperti ini bagaimana KPU Kota Padang melakukan perannya dengan maksimal karena kejadian seperti ini khususnya untuk Kota Padang sendiri belum pernah mengalaminya atau belum pernah merasakan pilkada ditengah pandemi dan kejadian alam yang terjadi. Karena

¹³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8734286722b/pemilih-muda-jangan-golput-oleh-anna-erliyana>

banyaknya batasan atau kegiatan tidak bisa dilakukan seperti biasanya seperti tidak boleh berkumpul ramai dan selalu menjaga jarak membuat KPU Kota Padang berusaha mencari cara untuk tetap memaksimalkan perannya supaya masyarakat tau informasi serta merasakan sosialisasi dan pendidikan politik tidak terjadi Pilkada yang dianggap gagal dan terlalu dipaksakan karena angka partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula turun karena adanya pandemi covid-19 tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan membuat suatu karya tulis tentang **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Padang?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui program kerja atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilihan Umum Indonesia. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapat selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian-penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara

- b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan peran KPU meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini sekaligus mengembangkan pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional terkait dengan peran KPU meningkatkan partisipasi pemilih muda di Padang.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian

¹⁴ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm.18.

membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹⁵ Dalam hal ini ialah tentang “Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2020.”

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat.¹⁶ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dari Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung di KPU. Data yang diperoleh dari penelitian adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik secara wawancara, observasi

¹⁵ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008. hlm.

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm.25.

maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Data primer diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para ahli. Data sekunder digunakan sebagai penambah data primer dan data tersier. Sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).¹⁸

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam melaksanakan penelitian kepustakaan ini diperoleh bahan hukum berupa data sekunder yaitu data yang data terolah atau telah disusun yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek

¹⁷ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm.106.

¹⁸ *Ibid.*

penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:¹⁹

a. Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada responden yang berlandaskan kepada tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Wawancara dengan Atika Triana selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

b. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan obyektif dan sistematis, meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun

¹⁹ Bambang Sungkono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. 2003. PT Raja Grafindo Persada. hlm.112.

dokumen hukum lainnya pada instansi yang terkait dengan dengan objek penelitian. Wawancara

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.²⁰ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Pemilih Pemula di Kota Padang.

2. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.²¹ Sampel dalam penelitian ini adalah Para Pemilih Pemula yang berusia 17-21 tahun di Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing*,²² yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk

²⁰ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm79.

²¹ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada . 2013. hlm.118-119.

²² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika. 1991. hlm.

memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkannya data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni mengubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktik, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu berdasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.²³

²³ Soejono Soekanto. *Op.cit.* hlm. 77.